

## **BAB II**

### **DINAMIKA HUBUNGAN RUSIA DAN SURIAH**

Negara-negara yang ada di dunia internasional memiliki masing-masing kepentingan nasional yang hendak dicapai. Hubungan kerjasama antar negara adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan-tujuan dari kepentingan nasional tersebut. Rusia termasuk negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasional negaranya.

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang negara Rusia dan negara Suriah serta dinamika hubungan kedua negara tersebut yang mencakup tentang negara Rusia secara umum dan politik luar negeri negara tersebut, dinamika hubungan negara Rusia dan negara Suriah serta negara Suriah secara umum.

#### **A. Profil Negara Rusia**

Rusia adalah negara yang resmi berdaulat pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Rusia menjadi negara yang mewarisi kekuatan dari Uni Soviet. Rusia merupakan negara yang memiliki wilayah seluas 17.125.200 km<sup>2</sup> dan menjadi negara terluas di dunia. Rusia memiliki batas wilayah di Utara dan Timur dengan Samudera Arktik dan Samudera Pasifik. Di bagian Selatan, Rusia berbatasan dengan Korea Utara, Cina, Mongolia dan Kazakhstan, Azerbaijan dan Georgia. Kemudian di sebelah Barat Daya dan Barat Rusia dengan Ukraina, Belarus, Latvia dan Estonia serta Finlandia dan Norwegia (Keenan, Raeff, & McCauley, 2019).

Rusia mengganti bentuk negaranya menjadi negara Federasi, yang membuat keadaan administrasi yang dimiliki Rusia berubah. Sistem administratif Rusia berlaku dimulai pada tahun 1993. Kemudian sistem tersebut ditransformasikan sejak subjek Federal bergabung

dipertengahan tahun 2000. Di Rusia saat ini ada 21 Republik etnis bersama 9 Krai (Wilayah), 46 Oblast (Daerah), tiga kota tingkat Federal (Moskow, Saint Petersburg dan Sevastopol) satu Oblast otonom (Oblast Otonom Yahudi) dan empat Okrug (Distrik) otonom (Keenan, Raeff, & McCauley, 2019).

Dibawah konstitusi baru, Majelis Federal menjadi Badan Legislatif Negara. Badan tersebut terdiri dari Dewan Federasi atau Majelis Tinggi yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing Divisi Administratif Rusia dan Duma Negara atau sebuah majelis rendah yang beranggotakan 450 orang yang dipilih berdasarkan popularitas. Semua Undang-Undang harus terlebih dahulu melewati Duma Negara sebelum dinilai oleh Dewan Federasi. Veto yang dimiliki Presiden dari Rancangan Undang-Undang dapat dikesampingkan oleh legislatif dengan mayoritas suara dua pertiga atau Rancangan Undang-Undang dapat diubah untuk memasukkan keinginan Presiden dan lulus dengan suara mayoritas (Taruskin & dkk, 2019).

Dewan Federasi juga harus menyetujui semua penunjukan Presiden pada Badan Peradilan Tertinggi Negara (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). Konstitusi baru juga memberikan perlindungan kesejahteraan, akses pada jaminan sosial, pensiun, perawatan kesehatan secara gratis dan perumahan yang terjangkau. Namun hukum nasional lebih diutamakan daripada hukum regional dan lokal. Hal ini membuat Presiden Vladimir Putin pada tahun 2000 membuat tujuh distrik Federal yang berada diatas tingkat Regional untuk meningkatkan kekuasaan Pemerintah Pusat atas Daerah. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh Dmitry Medvedev yang melanjutkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Moskow untuk menghentikan Separatisme dan Militan Islam di Kaukasus pada tahun 2010.

## **B. Dinamika Politik Luar Negeri Rusia**

Setelah Rusia menjadi negara yang berdaulat, terjadi perubahan dalam beberapa aspek yaitu ekonomi, militer dan politik. Sejak tahun 1991, Rusia memiliki politik luar negeri yang tidak jauh berbeda dari masing-masing masa pemerintahan Presiden yang sedang menjabat. Tujuan dari masing-masing Presiden adalah sama-sama mencapai kepentingan nasional yang dirancang bagi Rusia.

### **1) Politik Luar Negeri Pada Masa Borist Yeltsin**

Boris Yeltsin adalah Presiden pertama yang terpilih di Rusia setelah resmi menjadi negara Federasi. Pada tahun 1991 merupakan tahun Rusia memasuki masa transisi setelah berakhirnya ideologi Sosialisme-Komunisme menuju demokrasi. Pada masa pemerintahan Yeltsin terdapat banyak kendala dalam bidang politik, sosial dan ekonomi (Saragih, 2008). Masa transisi politik yang terjadi di Rusia menyebabkan rakyat Rusia masih menganggap bahwa Demokrasi merupakan bentuk lain dari Komunisme. Kemudian dalam bidang ekonomi, Pemerintahan Yeltsin harus mengalami dampak dari kebijakan era Mikhail Gorbachev yang gagal (McCauley & Lieven, 2019). Hal ini menyebabkan tantangan ekonomi yang berat berada di dalam pemerintahan Boris Yeltsin.

Dalam politik luar negerinya, Yeltsin mengarah untuk memprioritaskan hubungan dengan pihak barat terutama dengan Amerika Serikat. Namun hubungan tersebut berakhir karena kedua negara tidak memiliki tujuan geopolitik yang sama. Pada tahun 1995 Yevgeny Primakov menjadi Menteri Luar Negeri Rusia dan membuat politik luar negeri Rusia menekankan pada pergantian kekuatan unilateral yang berada ditangan Amerika Serikat. Untuk melawan kekuatan dominasi dari Amerika Serikat, Rusia memperkuat hubungan politik dan militernya dengan Cina dan India. Meskipun

hubungan yang kurang baik antara Cina dan India tidak mungkin menantang Amerika Serikat (McCauley & Lieven, 2019).

Pada akhir masa jabatan Boris Yeltsin politik luar negeri Rusia dikendalikan oleh Menteri Luar Negeri Yegveny Primakov. Hal ini disebabkan karena kebijakan luar negeri oleh Yeltsin yang tidak konsisten yaitu strategi *Divide and Rule* nya adalah penghalang bagi pembentukan arah kebijakan luar negeri yang efektif. Selain itu gaya politik luar negeri Yeltsin yang condong ke Barat tidak cocok untuk diterapkan di Rusia. Hal tersebut menyebabkan kebijakan politik luar negeri periode Boris Yeltsin diwarnai dengan ketidakberdayaan, kontradiksi dan kebingungan (McCauley & Lieven, 2019).

## 2) Politik Luar Negeri Pada Masa Vladimir Putin

Vladimir Putin merupakan Presiden kedua Rusia yang menjabat mulai dari tahun 1999 dan memiliki peran penting dalam pemerintahan Rusia. Meskipun Putin ingin mempertahankan hubungan strategis antara Rusia dengan Amerika Serikat, Ia memfokuskan untuk memperkuat hubungan politik dan keamanan dengan Eropa khususnya Jerman, Perancis dan Britania Raya. Vladimir Putin juga mempertahankan hubungan Rusia dengan Iran.

Pada masa pemerintahannya, Vladimir Putin memiliki dasar politik yaitu Demokrasi Berdaulat. Hal ini mengacu pada kegiatan demokrasi harus ditentukan oleh Rusia. Maka dari itu Putin menjalankan dua program untuk pemerintahannya yaitu program pertama adalah mengembalikan permasalahan sosial dan kedisiplinan para anggota pemerintahan, program ini diterapkan selama dua tahun. Program kedua adalah pembangunan ekonomi yang lebih disesuaikan dengan kondisi ekonomi Rusia dan terbebas dari campur tangan pihak luar,

program ini diterapkan selama delapan hingga sepuluh tahun (Saragih, 2008).

Sebelum terpilihnya Putin menjadi Presiden Rusia untuk masa jabatan 2018 hingga 2024, Ia memiliki konsep kebijakan luar negeri Rusia yang mencakup lima poin dan 108 poin penjelasannya. Poin pertama adalah Ketentuan Umum, poin kedua adalah Dunia Modern dan Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia, poin ketiga adalah Prioritas Federasi Rusia untuk Mengatasi Tantangan Global, poin keempat adalah Prioritas Kebijakan Luar Negeri Regional Federasi Rusia dan poin kelima adalah Formulasi Kebijakan Luar Negeri Rusia beserta Implementasinya (Pars Today, 2017).

### **3) Politik Luar Negeri Pada Masa Dmitry Medvedev**

Dmitry Medvedev merupakan presiden ketiga Rusia yang menggantikan Vladimir Putin pada tahun 2008. Medvedev merujuk pada bidang ekonomi yang masih menjadi permasalahan yang penting bagi Rusia pasca berakhirnya Uni Soviet. Pada kebijakan politik luar negeri Rusia, Dmitry Medvedev menekankan pada poin kontinuitas dalam mencapai kepentingan nasional. Selain poin ekonomi Rusia, Dmitry mengatur fungsi pemerintah dalam membuat kebijakan politik luar negeri Rusia. Hal ini disebabkan karena selama kepemimpinan Presiden-Presiden sebelumnya Presiden selalu dianggap memiliki hak monopoli untuk mengatur kebijakan luar negeri Rusia, padahal pemerintah memiliki fungsi yang sama dalam mengatur kebijakan tersebut (Bovt, 2008).

Pada bidang keamanan di tahun 2009, Dmitry Medvedev membuat kebijakan Keamanan Nasional Federasi Rusia sampai tahun 2020. Kebijakan tersebut berisi tentang Presiden dan pemerintahannya untuk menghadapi tantangan dunia internasional. Hal tersebut dilakukan dengan mengakui bahwa sistem strategi

prioritas, tujuan dan langkah-langkah yang berhubungan dengan kebijakan dalam negeri dan luar negeri dapat menentukan tingkat keamanan nasional dan tingkat kestabilan jangka panjang pembangunan suatu negara. Federasi Rusia mengadakan hubungan internasional yang dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan lembaga keamanan antar bangsa. Sementara untuk melindungi kepentingan nasionalnya, Rusia memberlakukan kebijakan yang rasional dan efisien (Bovt, 2008).

### **C. Dinamika Hubungan Rusia dan Suriah**

Rusia adalah negara yang memiliki kekuatan secara politik, ekonomi dan militer. Hal ini menyebabkan setiap kebijakan yang dibuat menjadi hal yang menarik bagi dunia internasional. Begitu pula dalam menjalin kerjasama antar negara, Suriah merupakan salah satu rekan yang strategis bagi Rusia. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan kedua negara yang terjalin dengan baik sejak Rusia masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Hubungan Rusia dan Suriah terus berlanjut hingga Rusia menjadi negara Federasi. Hal tersebut karena Suriah merupakan satu-satunya negara yang menjadi sekutu strategis Rusia di Timur Tengah.

#### **1) Dinamika Hubungan Rusia dan Suriah Pada Masa Uni Soviet**

Hubungan Rusia dan Suriah telah terjalin sejak Rusia masih menjadi Uni Soviet dan Suriah belum diakui menjadi suatu negara. Uni Soviet dan Suriah memiliki hubungan bilateral yang dekat dan hangat. Pada tahun 1946, Uni Soviet menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Suriah. Suriah memegang peran penting bagi posisi Uni Soviet dalam dunia internasional. Hal ini menjadikan Suriah menjadi negara yang spesial diantara negara-negara yang menjadi aliansi Uni Soviet. Selain itu selama lebih dari dua puluh tahun

Suriah telah memperoleh sebagian besar peralatan militernya dari Uni Soviet.

Pada tahun 1970 hubungan Uni Soviet dengan Suriah semakin kuat dibawah kepemimpinan Presiden Hafez Al-Assad. Setahun setelahnya pada tahun 1971, Uni Soviet mendirikan pangkalan angkatan laut di Suriah tepatnya di Tartus. Pangkalan tersebut didirikan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa Uni Soviet dapat bersaing dengan Amerika Serikat dalam dunia internasional. Pada tahun 1973 terjadi perang Yom Kippur antara Suriah dengan Israel yang membuat Uni Soviet membantu Suriah, sedangkan Israel mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Setelah perang berakhir, Suriah mengalami kekalahan dalam perang tersebut. Hal itu menyebabkan Suriah membuat program kerjasama pembangunan angkatan bersenjata dengan Uni Soviet. Bagi Suriah, Uni Soviet berperan sebagai aliansi yang dapat membuat posisinya di Timur Tengah sebagai salah satu negara yang menentukan dalam upaya perdamaian di kawasan tersebut (Bandoro, 1991).

Pada tahun 1985 Uni Soviet dibawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev dan mengalami banyak perubahan dalam perjanjian dengan Suriah. Gorbachev meredakan beban yang ada diantara hubungan Uni Soviet dengan Suriah. Mikhail Gorbachev mengatakan akan terus mengadakan kerjasama dengan Suriah dan memberikan bantuan ekonomi serta militer. Hubungan kedua negara tersebut akan terus berlanjut sampai kepemimpinan Suriah dibawah Hafez Al-Assad digantikan oleh Bashar Al-Assad (SBS News, 2013).

## **2) Dinamika Hubungan Rusia dan Suriah Pada Masa Negara Federasi Rusia**

Setelah rusia resmi menjadi negara yang berbentuk Federasi, hubungan antara Rusia dan Suriah

masih terjalin dengan sangat baik. Pada tahun 1990 sebelum Uni Soviet resmi bubar, Suriah memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan posisinya dengan bergabung sebagai koalisi penentang pemimpin Irak, Saddam Hussein selama Perang Teluk. Sembilan tahun kemudian Hafez Al-Assad mengunjungi Rusia setelah Uni Soviet resmi bubar. Dalam pertemuan tersebut Hafez Al-Assad dan Boris Yeltsin membahas untuk menentang kediktatoran negara-negara dalam urusan dunia internasional. Pada tahun 2005 adalah waktu bagi Bashar Al-Assad untuk mengunjungi Rusia dan menemui Presiden Vladimir Putin. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperbaharui hubungan kedua negara setelah melewati era Uni Soviet. Selain itu pertemuan tersebut menghasilkan penghapusan 73 persen hutang Suriah pada era Uni Soviet (SBS News, 2013).

Seiring berjalannya waktu hubungan antara Rusia dan Suriah semakin erat terlebih dengan adanya Konflik Sipil di Suriah. Rusia berada di pihak yang mendukung rezim Bashar Al-Assad. Hal ini membuat pemerintah Rusia memberikan sejumlah bantuan berupa veto yang selalu dikeluarkan disetiap resolusi konflik yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Selain itu Rusia juga memberikan peralatan militer untuk menunjang pemerintahan Bashar Al-Assad melawan oposisi. Dukungan Rusia tersebut menuai banyak reaksi yang ada di dunia internasional. Ada pihak yang pro namun ada pula yang kontra terhadap sikap Rusia tersebut.

#### **D. Rezim Pemerintahan Negara Suriah**

Suriah merupakan negara yang terletak di Pantai Timur Laut Mediterania di Asia Barat Daya. Suriah memiliki ibukota negara yang bernama Damaskus yang tepatnya terletak di Sungai Barada di kaki Gunung Qasiyun. Suriah meraih kemerdekaannya pada tahun 1946 dengan keadaan politik yang sangat tidak stabil. Suriah memiliki sistem multi



partai dengan satu rumah legislatif yang terdiri dari kepemimpinan regional dari Partai Sosialis Arab. Sedangkan kekuasaan legislatif dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun. Di Suriah, Partai Ba'th menjadi partai yang mutlak menjadi pemenang dalam pemilihan tersebut. Dalam urusan administratif, Suriah menerapkan sentralisasi dan bergantung pada Menteri dalam negeri dalam pemerintahan nasionalnya. Landasan hukum yang digunakan di Suriah berasal dari Yurisprudensi Islam dan hukum sipil kedua Prancis. Sedangkan bagi sekte non-muslim, masing-masing memiliki pengadilan sendiri dengan yuridiksi atas kasus yang bersifat pribadi. Dalam bidang politik, Suriah memiliki dua pemimpin yang terkenal yang berasal dari keluarga Assad.

### 1) Suriah Dibawah Kepemimpinan Hafez Al-Assad

Presiden Hafez Al-Assad lahir pada 6 Oktober 1930 di Qardaha, Suriah dan berasal dari keluarga miskin dari Alawites yaitu kelompok minoritas Islam di Suriah. Hafez bergabung dalam partai Ba'th pada 1946 sebagai aktivis pelajar. Kemudian pada tahun 1952 Hafez memasuki Akademi Militer Hims dan lulus menjadi seorang pilot angkatan udara. Pada tahun 1959 sampai 1961 selama persatuan Suriah yang singkat dengan Mesir di Republik Arab bersatu, Hafez dan perwira militer lainnya diasingkan di Mesir. Namun mereka membentuk komite untuk membangkitkan kembali kekuasaan partai Buruh di Suriah (International Relations Organizations, 2019).

Pada tahun 1963 terjadi kudeta terhadap pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Amin Al-Hafiz. Kudeta tersebut dilaksanakan oleh Komite Militer Cabang Regional Suriah dari Partai Ba'th dan memutuskan bahwa yang mengambil alih kekuasaan adalah Hafez Al-Assad, Muhammad Umran dan Salah Jadid. Hal ini mengantarkan Hafez Al-Assad menjadi

Menteri Pertahanan Suriah. Selama Hafez menjadi Menteri Pertahanan, Suriah mengalami Perang Enam Hari yang menyebabkan daerah Dataran Tinggi Golan diambil alih oleh Israel. Kejadian tersebut mengancam karir politik Hafez dan kemudian melibatkan Hafez memperebutkan kekuasaan Suriah dengan Salah Al-Jadid. Perebutan kekuasaan dimenangkan oleh Hafez Al-Assad yang kemudian menangkap Salah Al-Jadid beserta anggota pemerintah lainnya (Macfarquhar, 2000).

Pada tahun 1971 Suriah dipimpin oleh Presiden Hafez Al-Assad berdasarkan dengan demokrasi. Hafez Al-Assad memiliki tipe kepemimpinan yang tegas dan otoriter. Hal ini karena pada masa kepemimpinannya, Hafez melakukan pemberantasan terhadap para pembangkang politiknya dengan cara ditangkap, disiksa dan dieksekusi. Namun dengan kepemimpinan tersebut, Hafez Al-Assad membawa Suriah menjadi negara yang stabil dan memiliki kekuatan di wilayah Timur Tengah (International Relations Organizations, 2019).

Bidang ekonomi selama masa pemerintahan Hafez Al-Assad di Suriah, sebagian besar urusan ekonomi dikendalikan oleh negara. Namun disisi lain, Hafez berupaya membantu meningkatkan taraf hidup rakyat Suriah melalui pemberian pinjaman dan kredit, memberikan pendidikan tambahan untuk menuntaskan buta huruf diantara rakyat Suriah dan bantuan kesehatan. Dalam politik dalam negeri, Hafez terus mencari dukungan untuk politiknya agar tidak ada resiko kudeta yang berasal dari dalam negeri terhadapnya. Oleh karena itu Hafez menempatkan anggota keluarga, teman-teman dan kolega yang ia percaya untuk berada di posisi-posisi menonjol di Pemerintahannya. Sementara dalam politik luar negerinya, Hafez membangun militer Suriah dengan bantuan Uni Soviet. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi cita-cita Hafez Al-Assad untuk menjadikan

Suriyah menjadi negara yang memiliki posisi penting di dunia Arab (International Relations Organizations, 2019). Hafez Al-Assad tutup usia di tahun ke 69 dan kepemimpinan Suriyah digantikan oleh sang anak yaitu Bashar Al-Assad yang mulai berkuasa di Suriyah pada tahun 2000.

## 2) Suriyah Dibawah Kepemimpinan Bashar Al-Assad

Bashar Al-Assad lahir pada 11 September tahun 1965 dan merupakan anak ketiga dari keluarga Assad. Ia mulai memimpin Suriyah pada 17 Juli tahun 2000 setelah wafatnya sang Ayah. Bashar menempuh pendidikan sebagai dokter di Universitas Damaskus dan lulus menjadi dokter di militer angkatan darat Suriyah pada tahun 1988. Bashar sempat pindah ke London untuk mengambil pendidikan dokter spesialis di bidang kesehatan mata. Namun Bashar diperintahkan oleh sang Ayah untuk kembali ke Suriyah karena kakaknya, Basil Al-Assad meninggal dunia sehingga Bashar akan menjadi pengganti kepemimpinan ayahnya (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2018).

Setelah kembali ke Suriyah, Bashar Al-Assad segera menjadi Presiden Suriyah dengan meraih 97 persen suara di Negara tersebut. Bashar Al-Assad mewarisi struktur politik yang terkenal sangat ketat dan otoriter. Selain itu Bashar Al-Assad hanya harus meneruskan hubungan kerjasama antara Suriyah dengan Rusia sebagai hubungan bilateral yang sangat strategis. Pada awal tahun kepemimpinannya, politik dalam negeri Bashar mengacu pada janji untuk mengadakan reformasi yang luas termasuk memodernisasi ekonomi, memerangi korupsi dan merasakan pengalaman demokrasi Suriyah sendiri (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2018).

Setelah Bashar Al-Assad menyatakan politik dalam negerinya memuat hal-hal seperti diatas, pihak

berwenang mengizinkan surat kabar independen pertama setelah lebih tiga dekade untuk mulai menerbitkan berita. Selain itu para intelektual meminta untuk reformasi luas mengizinkan pertemuan politik dibuat terbuka bagi publik. Namun reformasi yang luas tersebut tidak berlangsung lama dengan adanya Undang-Undang Darurat. Aturan tersebut berlaku dengan dibatasinya pertemuan intelektual secara publik, beberapa tokoh oposisi yang ditangkap dan kebebasan pers yang kembali diberlakukan. Pada Mei 2007, Bashar Al-Assad kembali memenangkan referendum lain dengan perolehan 97 persen suara untuk memperpanjang masa jabatannya namun dituduh sebagai hasil palsu oleh kelompok oposisi (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2018).

Pada politik luar negerinya Bashar masih melanjutkan sebagian kebijakan yang dimiliki ayahnya, namun juga ada pula kebijakan luar negeri yang berbeda untuk membuktikan jika keputusannya efektif dan berhasil. Kebijakan yang dilanjutkan oleh Bashar Al-Assad antara lain proses damai negara Arab dengan Israel, peran Suriah dalam konflik Lebanon dan hubungan Suriah dengan dunia internasional. Untuk permasalahan dataran tinggi Golan yang diambil oleh Israel, Bashar Al-Assad memilih untuk tidak menekan Israel seperti hal yang dilakukan oleh ayahnya. Namun Bashar Al-Assad lebih mengusahakan untuk melakukan perundingan damai dengan Israel (BBC News, 2018).

Hubungan bilateral yang terjalin antara Suriah dan Rusia masih berjalan baik setelah pada tahun 2005 terjadi penghapusan hutang Suriah kepada Rusia sebanyak 73 persen dan pembaharuan perjanjian kerjasama yang dilakukan setelah kunjungan pertama yang dilakukan Bashar ke Moskow sebagai Presiden Suriah. Setelah kunjungan untuk memperbaharui perjanjian kerjasama antar dua negara tersebut, Delegasi dari Angkatan Laut

Suriah mengunjungi Rusia. Pada kunjungan tersebut Damaskus dan Moskow sepakat untuk merencanakan kerja sama militer antar kedua pihak terutama pembangunan infrastruktur di pelabuhan Tartus di barat laut Suriah (SBS News, 2013).

Pada tahun 2010 setelah Rusia resmi dipimpin oleh Dmitry Medvedev, Ia adalah Presiden pertama Rusia yang melakukan kunjungan ke Damaskus. Kunjungan tersebut memberikan hasil baik bagi Suriah yang dijanjikan untuk mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur minyak dan gas serta pengembangan pembangkit energi nuklir. Kerja sama pada bidang militer antara Suriah dan Rusia semakin erat seiring dengan adanya sejarah hubungan kedua negara sejak Rusia masih menjadi Uni Soviet. Memasuki tahun 2011, Suriah memiliki gejolak yang terjadi pada pemerintahan Bashar Al-Assad tidak terhindarkan dengan berbagai protes yang diberikan oleh oposisi. Kepemimpinan Bashar Al-Assad semakin diuji pada tahun 2011 dengan adanya konflik sipil yang pecah di Suriah.